



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG
SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2024**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif serta sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang SDA, maka dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, pangan dan perikanan antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Desember 2024
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,



Ir. Benny Sakti, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Dasar Hukum	5
1.3	Tujuan dan Sasaran Kegiatan	7
1.4	Uraian Kegiatan	8
1.5	Waktu Pelaksanaan	8
BAB II	: PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI	9
2.1	Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	9
2.2	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi	10
2.2.1	Koordinasi Monev Verifikasi dan Validasi Data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024	10
2.3	Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten/Kota	12
2.4	Monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) ke Kabupaten/Kota	27
2.5	Monitoring dan evaluasi perhutanan sosial dan budidaya lebah madu ke Kabupaten/Kota	37
2.5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TP-Dekon tahun 2024 dan rencana tahun 2025	43
2.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	59
BAB III	PENUTUP	65
	LAMPIRAN	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek dalam siklus manajemen pembangunan yang belum diimplementasikan dengan baik, tepat dan berkesinambungan. Evaluasi merupakan alat bantu pemerintah dalam menyusun, menetapkan dan mengelola kebijakan. Dalam konteks dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD, evaluasi berguna untuk menelusuri, mengukur, dan menganalisa hasil dan capaian pelaksanaan

rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Artinya, evaluasi perlu dilakukan atas kebijakan/prioritas pembangunan, fokus prioritas, program pembangunan atau kegiatan prioritas. Analisisnya mencakup berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan tersebut, termasuk pencapaian terget dan sasarannya. Dalam kaitan itu, evaluasi juga perlu dilakukan atas isu – isu pembangunan yang secara dinamik terus bergulir.

Salah satu tugas penting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang selama ini dilaksanakan Perangkat Daerah. Secara lebih umum, pemantauan melalui kunjungan ke lapangan dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Provinsi Sumatera Barat, APBN Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU). Monitoring dan evaluasi semacam ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Diharapkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dan rujukan ketika menyusun perencanaan dan khususnya ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, prioritas dan fokus prioritas/program beserta target/sasaran maupun indikator kinerja terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam maka dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 12 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 13 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 14 Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/04/II/Set/Bappeda-2024 tanggal 3 Februari 2024, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

- 15 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD: DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah :

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan.
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Adapun sasaran dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah:

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan.
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera

Barat Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat dicapai pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
4. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

1.4. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD awal Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 109.502.640,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 110.087.483,- yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang SDA
3. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan lingkup bidang SDA
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, akselerasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

1.5. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2024.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

2.1 DASAR DAN TUJUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda yang dilakukan secara terus menerus dan berkala. Sebagai salah satu sumber bahan pemenuhan data dan informasi daerah tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, hasil kegiatan

monitoring selanjutnya diolah kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/instansi terkait. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga *output* dan *outcome* nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Persiapan

Kegiatan persiapan yang dilaksanakan meliputi *baseline* data yang teranggarkan pada APBD dan DAK Tahun Anggaran 2024, inventarisasi data lokasi, pemilihan lokasi berdasarkan data perangkat daerah.

b. Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen RKPD dan APBD Provinsi Sumatera Barat TA 2024.

Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan yang diharapkan adalah :

1. Data perkembangan kemajuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Data identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

2.2.1. RAPAT KOORDINASI MONEV VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA P3KE PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TRIWULAN I TAHUN 2024

Indonesia menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Dengan telah ditetapkannya surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 372/TS.03.03/K/11/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka bantuan pangan beras dan surat Nomor 12/TS.03.03/K/1/2024 tanggal 10 Januari 2023 perihal Penyampaian Data P3KE untuk Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2024, maka akan segera dilakukan percepatan penyaluran bantuan pangan Tahap 1 bulan Januari-Maret 2024. Untuk itu perlu bersama-sama dilakukan koordinasi verifikasi dan validasi data by name and by address (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk bantuan pangan beras dengan perangkat daerah terkait.

Rapat dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/12/I/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 29 Januari 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan agenda Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024. Rapat dihadiri oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat, Kepala Kantor Pos Cabang Utama Padang, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kepala Dinas

Pangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Perwakilan BRAC Internasional dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Rapat menghasilkan beberapa Kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Agar Bappeda Kabupaten/Kota mengawal proses verifikasi dan validasi data P3KE.
2. Program penyaluran bantuan pangan ini harapannya tepat sasaran.
3. Data yang dispute saat penyaluran akan diverifikasi ulang dan ada berita acara.
4. Agar kita bersama siap mendukung program pemerintah, khususnya terkait kolaborasi data.
5. Untuk penyaluran, dan pengawasan akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk evaluasi.
6. Data Bulog dijadikan baseline.



Hasil rapat sebagaimana terlampir.

2.3. MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 KE KABUPATEN/KOTA

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas di segala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multidimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan

kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur diminta untuk mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi serta mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota. Untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ke Kabupaten/Kota. Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut :

1. Kabupaten Pesisir Selatan

- Kabupaten Pesisir Selatan tidak dijabat oleh Pj. Kepala Daerah sehingga tidak merubah SK Tim TKPK tahun 2024 yang sudah ditetapkan.
- Sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dan LP2KD tahun 2023.

- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : sudah melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 masih dalam proses, dan penetapan SK oleh Kepala Daerah masih dalam proses serta belum disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan. Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah : belum didapatkan angka anggarannya.
- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan pada bulan Agustus 2024

2. Kabupaten Agam

- Kabupaten Agam sekarang dijabat oleh Pj. Kepala Daerah dan sudah merubah SK Tim TKPK tahun 2024.
- Sudah menyusun dokumen RPKD. RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : Sudah melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kabupaten/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 128.088.184.535,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 87.087.383.327,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 7.012.202.948,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 33.988.598.262,-

- Pelaksanaan Rakor TKPK direncanakan 2 kali dalam 1 tahun.

3. Kota Pariaman

- Kota Pariaman sekarang dijabat oleh Pj. Kepala Daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses.
- Sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 dalam proses penyusunan.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan.
- Tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : Belum melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah, untuk update informasi perkembangan dokumen belum dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah belum didapatkan angka anggarannya.

4. Kota Padang Panjang

- Kota Padang Panjang sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses.

- Sudah menyusun dokumen RPKD. RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA masih dalam proses, serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 27.695.235.226,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 15.749.036.500,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 7.041.642.690,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 4.904.556.036,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK dilaksanakan pada Minggu ke-2 Juli 2024 dan Minggu ke 2 Desember 2024

5. Kabupaten Padang Pariaman

- Kabupaten Padang Pariaman sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan masih dalam proses (RPKD, RAT tahun 2024 dan LP2KD tahun 2023).
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan.
- Tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA masih dalam proses, serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi.

- Tindaklanjuti data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses dilaksanakan, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah belum didapatkan angka anggarannya.
- Pelaksanaan Rakor TKPK Belum (direncanakan 2 kali dalam 1 tahun (Juli dan Desember)

6. Kabupaten Solok

- Kabupaten Solok sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun (RPKD, RAT tahun 2024 dan LP2KD tahun 2023).
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Untuk tindaklanjuti data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA dalam proses dilaksanakan, dalam proses penetapan SK oleh KDH verifikasi dilakukan saat nagari sudah musyawarah Nagari dan proses penetapan menunggu Musyawarah Nagari dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjuti data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen belum dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 176.831.433.693,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 985.653.099,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 97.121.123.516,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 78.724.657.078,-

- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

7. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Belum ada data

8. Kabupaten Solok Selatan

- Kabupaten Solok Selatan sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
 - Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun (RPKD, RAT tahun 2024, dan LP2KD tahun 2023).
 - Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan.
 - Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi.
 - Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.
 - Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
 - Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Total alokasi pagu | : Rp. 57.946.391.968,- |
| Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran | : Rp. 32.403.326.541,- |
| Strategi Meningkatkan Pendapatan | : Rp. 2.879.827.964,- |

Strategi Meminimalkan wilayah

Kantong Kemiskinan : Rp. 22.663.237.463,-

- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

9. Kota Bukittinggi

- Kota Bukittinggi sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen RPKD sudah selesai, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA belum dilaksanakan, belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 belum dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Rakor TKPK direncanakan bulan september 2024

10. Kabupaten 50 Kota

- Kabupaten 50 Kota sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan dijabat oleh Sekda.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD dalam proses penyusunan, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi.

- Tindaklanjuti data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi karena dalam proses verifikasi dan validasi nagari data P3KE 2023.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 24,869,951.970,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 18,315,056,350,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1,560,377,920,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 4,994,517,700,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

11. Kabupaten Pasaman Barat

- Kabupaten Pasaman Barat sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah didapatkan data P3KE pemutakhiran 2024.
- Untuk tindaklanjuti data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi verifikasi BNBA P3KE berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD.
- Tindaklanjuti data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah,

dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu : Rp. 202,896,400,294,-

Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran : Rp. 126,616,860,015,-

Strategi Meningkatkan Pendapatan : Rp. 10,035,217,429,-

Strategi Meminimalkan wilayah

Kantong Kemiskinan : Rp. 66,244,322,850,-

- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan.

12. Kota Sawahlunto

- Kota Sawahlunto sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 dalam proses.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA dalam proses dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Total alokasi pagu | : Rp. 39,506,876,291,- |
| Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran | : Rp. 25,358,212,934,- |
| Strategi Meningkatkan Pendapatan | : Rp. 747,141,465,- |
| Strategi Meminimalkan wilayah | |
| Kantong Kemiskinan | : Rp. 13,401,521,892,- |
- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

13. Kabupaten Sijunjung

- Kabupaten Sijunjung sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah ditetapkan dan disampaikan disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 126,016,003,177,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 34,685,011,623,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 31,896,592,087,-
Strategi Meminimalkan wilayah	
Kantong Kemiskinan	: Rp. 62,434,398,747,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan.

14. Kabupaten Tanah Datar

- Kabupaten Tanah Datar sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD dalam proses disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses karena dari 75 nagari, belum semuanya melakukan pemutakhiran data, jadi belum disampaikan ke P3KE.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses, dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 39.809.792.718,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 35.695.374.310,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1.030.246.700,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 2.322.781.808,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

15. Kota Padang

Belum ada data

16. Kota Solok

- Kota Solok sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah proses disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses disusun, dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah sampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 61,578,413,504,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 37,891,607,541,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1,633,178,200,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 2,053,627,763,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan.

17. Kabupaten Pasaman

- Kabupaten Pasaman sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun.

- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses disusun, dan belum disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 belum, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 belum dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 151,283,604,960,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 96,976,445,100,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 2,324,923,000,-
Strategi Meminimalkan wilayah	
Kantong Kemiskinan	: Rp. 51,982,236,860,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan.

18. Kabupaten Dharmasraya

- Kabupaten Dharmasraya sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD belum disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun.
- Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah disusun, dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam

proses, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 89,382,571,523,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 66,508,623,400,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 3,489,562,350,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 19,384,385,773,-

- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan.

19. Kota Payakumbuh

- Kota Payakumbuh sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan, Sekda sebagai ketua TKPK.
- Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan.
- Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah disusun, dan sudah disampaikan ke Provinsi.
- Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.
- Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.
- Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 116,005,975,979,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 4,360,795,310,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 59,257,545,222,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 52,387,635,447,-
- Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024	

2.4. MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD PG) KE KABUPATEN/KOTA

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan amanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) ke Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

- Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
- Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
- Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai;
- Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut:

1. Kabupaten Agam

- Kabupaten Agam sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai tahap 1-2.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.

- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : belum memahami tujuan penyusunan dan koordinasi tidak maksimal.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : melakukan koordinasi dengan OPD terkait.

2. Kabupaten Padang Pariaman

- Kabupaten Padang Pariaman sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam penyusunan dokumen RAD PG, namun dengan banyaknya agenda penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, RKPD dan RPJPD kab. Padang Pariaman yang harus diselesaikan, penyusunan dokumen RAD PG baru dijadwalkan pada triwulan III ini.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : akan melaksanakan penyusunan dokumen RAD PG pada triwulan III tahun 2024, yakni pada bulan September.

3. Kabupaten Pasaman

- Kabupaten Pasaman sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : Dalam penyusunan RAD-PG awalnya ada beberapa kendala, salah satu kendalanya adalah tim penyusun mengalami kesulitan dalam menentukan strategi dan aksi yang sesuai dengan tujuan strategi

yang telah ditetapkan, namun sekarang sudah teratasi, dan juga pada waktu sekarang penyusunan yang diakhir tahun, tim mengalami kendala untuk mensinkronkan jadwal penyusunan dokumen dengan kegiatan pada masing-masing OPD.

- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : Rancangan RAD-PG kabupaten Pasaman akan disesuaikan dan disempurnakan kembali sejalan dengan penyusunan dokumen RPJMD kabupaten Pasaman.

4. Kabupaten Pasaman Barat

- Kabupaten Pasaman Barat belum mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : belum mengetahui kewajiban untuk menyusun RAD PG.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : menindaklanjuti dengan mempelajari pedoman penyusunan RAD PG.

5. Kabupaten Lima Puluh Kota

- Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai Langkah ke 3-8.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : penyusunan dokumen RAD PG bersamaan dengan penyusunan 5 dokumen perencanaan sehingga matrik kebijakan sedikit terlambat.

- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : rencananya RAD PG tahun pelaksanaan dan pengesahannya sejalan dengan RPJMD yang akan datang.

6. Kabupaten Tanah Datar

- Kabupaten Tanah Datar sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai Langkah ke 3-8.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : susah koordinasi dengan OPD.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : penyusunan SK Tim.

7. Kabupaten Sijunjung

- Kabupaten Sijunjung sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai Langkah ke 1-2.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : kurangnya pemahaman OPD terhadap penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan strategis.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : penyusunan SK Tim.

8. Kabupaten Solok

- Kabupaten Solok sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.

- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : kurangnya pemahaman OPD terhadap penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan strategis.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : penyusunan SK Tim.

9. Kabupaten Pesisir Selatan

- Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai Langkah ke 3-8.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : kurangnya pemahaman OPD terhadap penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan strategis kurangnya semangat perencanaan dan evaluasi pada ASN.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : meminta fasilitasi Provinsi terhadap penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan strategis, menyusun rencana akhir dan sosialisasi rencana akhir bersama OPD terkait.

10. Kabupaten Kepulauan Mentawai

- Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai Langkah ke 3-8.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.

- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : beberapa OPD pemangku kepentingan belum ada yang belum respon terkait pengiriman matriks penajaman strategi RAD PG.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : menghubungi langsung OPD terkait pemangku kepentingan ke kantornya dan mengisi data yang dibutuhkan.

11. Kabupaten Solok Selatan

- Kabupaten Solok Selatan sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : belum terbentuk tim.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : mempelajari dan mensosialisasikan kepada OPD serta membentuk tim.

12. Kabupaten Dharmasraya

- Kabupaten Solok Selatan sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : belum terbentuk tim.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : mempelajari dan mensosialisasikan kepada OPD serta membentuk tim.

13. Kota Padang

- Kota Padang sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : kurangnya pemahaman OPD terhadap penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan strategis.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : Penyusunan SK tim.

14. Kota Bukittinggi

- Kota Bukittinggi sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan sudah sampai tahap 3-8.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : terbatasnya anggaran untuk rapat-rapat.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : akan dilakukan penyempurnaan draft/ finalisasi dokumen RAD PG serta akan melakukan penyelesaian RAD PG dalam peraturan Kepala Daerah.

15. Kota Payakumbuh

- Kota Payakumbuh sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Dalam proses menetapkan SK Tim penyusun.

- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : belum ada kab/kota yang melaksanakan penyusunan RAD PG, jadi tidak ada tempat untuk berdiskusi.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : mengadakan rapat.

16. Kota Solok

- Kota Solok sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG namun belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan baru Langkah 1-2.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait karena banyaknya kegiatan penyusunan dokumen dokumen perencanaan yang harus diselesaikan (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : segera disiapkan pembuatan SK tim penyusunan RAD PG.

17. Kota Sawahlunto

- Kota Sawahlunto sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan baru Langkah 1-2.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : RAD PG disusun berdasarkan perodesasi RPJMD, dibutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan untuk bisa menyelaraskan penyusunan dokumen RPJMD ke dalam RAD PG yang dijadikan rujukan terkait tentang pangan dan gizi berkoordinasi dengan OPD terkait pendampingan atau fasilitasi dari pemerintah Provinsi dalam menyusun RAD PG.

- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : pada tahun 2025 akan dilaksanakan penyusunan RAD PG tersebut simultan dengan RPJMD Kota Sawahlunto.

18. Kota Pariaman

- Kota Pariaman sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan sudah menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, tahapan perkembangan penyusunan baru Langkah 3-8.
- Sudah menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : menyesuaikan program kegiatan OPD yang terbatas guna mendukung TS1-TS4 yang terdapat dalam lembar kerja matriks aksi RAD PG keterbatasan data, seperti pada tabel indikator dan sasaran di BAB III.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : Penyelesaian draft RAD PG.

19. Kota Padang Panjang

- Kota Padang Panjang belum mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG dan belum menindaklanjuti untuk Menyusun dokumen.
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, belum ada tahapan perkembangan penyusunan.
- Belum menetapkan SK Tim penyusun.
- Tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen : menyesuaikan dengan waktu / periode RPJMD 2025-2029.
- Rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG : akan menyusun RAD PG sejalan dengan penyusunan Renstra OPD dan akan diselaraskan dengan RPJMD tahun 2025-2029.

4. MONITORING DAN EVALUASI PERHUTANAN SOSIAL DAN BUDIDAYA LEBAH MADU KE KABUPATEN/KOTA

Untuk mendukung percepatan pencapaian target Pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 maka terdapat beberapa program unggulan yang menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Salah satu fokus kegiatan dalam rangka Sumbar Sejahtera adalah meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan.

Perhutanan sosial merupakan salah satu program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, penguasaan pengelolaan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan. Sesuai arahan Keputusan Gubernur dimaksud, Bappeda bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan program unggulan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja program unggulan tersebut. Berkenaan dengan itu, Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Kabupaten Padang Pariaman

- Pertemuan Tim Monev dilaksanakan di Nagari Ringan-Ringan Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman yang dihadiri oleh Tim Monev Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Wali Nagari Ringan-Ringan, dan Gapoktan Gema Lestari Saiyo.
- Saat ini di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 5 Kelompok Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (Nagari) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM), yang sudah memiliki Izin Pengelolaan Kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kelompok tersebut

yaitu LPHN Sungai Buluah, LPHN Salibutan Lubuk Alung, HKm Aur Serumpung Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, HKm Sialangan Nagari Gunung Padang Alai dan HKm Leter W Nagari Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

- Secara umum, jumlah kelompok tani hutan yang dibina di Kab. Padang Pariaman adalah sebanyak 205 Kelompok Perhutanan Sosial dan 537 Kelompok Tani Hutan (KTH). Salah satu gapoktan yang ada yaitu Gapoktan GEMMA Lestari Saiyo ini terbentuk dari 21 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan 4 Kelompok Perhutanan Sosial (PS). Kelompok Tani Hutan di daerah ini sudah terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor SK : 522.4/292/PPMHA-2022.



- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah rutin melakukan fasilitasi/pembinaan terhadap perhutanan sosial ini dalam bentuk Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kelompok Perhutanan Sosial melalui kegiatan Pelatihan, Workshop, Sekolah Lapang, Coaching Clinic serta pemberian bantuan berupa Alat Ekonomi Produktif, Sarana Prasarana dan lain-lain.
- Kawasan Perhutanan Sosial di Kabupaten Padang Pariaman ini telah dimanfaatkan atau dikembangkan untuk beberapa usaha seperti budidaya lebah madu, ekowisata, pemanfaatan jasa lingkungan dan agroforestry.
- Untuk program budidaya lebah madu ini sudah dilakukan pembinaan. Program ini juga didukung dari dana desa nagari Pakandangan. Pemasaran madu tidak sulit karena sudah ada relasi dan juga dilakukan secara online. Pemasaran madu meningkat saat covid. Adanya budidaya lebah madu dapat menghidupkan Kelompok Wanita Tani di sekitar.
- Jumlah setup madu yang ada saat ini sudah mencapai 18.000 setup, sudah melebihi target Progul RPJMD yaitu 3.000 setup setiap tahunnya.

- Program/kegiatan untuk mendukung perhutanan sosial di antaranya :
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - Kegiatan Fisik dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana, Alat Ekonomi Produktif,, Pembuatan Hutan Rakyat, Tanaman Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu dll di 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Bimbingan Teknis dan Pembinaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Kendala dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dan budidaya lebah madu di antaranya:
 - Masih ada lokasi/kawasan yang belum diusulkan menjadi lokasi Perhutanan Sosial dengan berbagai kendala, antara lain, belum adanya kesepahaman masyarakat di tingkat Tapak terutama memberikan keyakinan kepada kaum Adat/Ninik Mamak (karena Sumatera Barat berbasis Adat), bahwa Perhutanan Sosial dilaksanakan bukan dalam rangka mengambil atau menyerobot ulayat kaum yang bersangkutan, tetapi lebih kepada memberikan akses kelola kawasan legal kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan tidak lagi bermasalah dengan hukum apabila memasuki dan mengambil hasil hutan bukan kayu yang berada dalam kawasan hutan Negara.



- Terkait pemasaran madu, yaitu bagaimana madu yang sudah dihasilkan oleh kelompok masyarakat terutama yang sudah mendapatkan fasilitasi dan bantuan dapat terjual dengan harga pasar yang layak dan memberikan keuntungan yang baik bagi masyarakat, meskipun saat ini kelompok masyarakat tersebut sudah memiliki upaya sendiri dalam menyiasati permasalahan ini, dan dari Pemerintah Provinsi sendiri juga sudah dilakukan berbagai upaya seperti, pencanangan Gerakan Minum Madu Asli (GEMMA) kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat untuk mengkonsumsi madu oleh Gubernur Sumatera Barat.
- Kesimpulan dan Saran : Pelaksanaan kegiatan perhutanan social dan budidaya lebah madu ini telah dapat meningkatkan pendapatan petani hutan (sesuai hasil survey pendapatan petani hutan tahun 2023), Adanya bantuan pihak III (swasta) dapat membantu pemasaran madu dan produk turunannya, dan Agar program perhutanan sosial dan budidaya lebah madu ini dapat terus dilaksanakan.

2. Kabupaten Agam

- Pertemuan Tim Monev dilaksanakan di Jorong Halalang Kecamatan Kamang Mudiak Kabupaten Agam yang dihadiri oleh Tim Monev Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Unit Cabang Agam), anggota KUPS Kamang Mudiak dan LPHN Agrowisata Sarasah Bukik Kincia Jorong Halalang;
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah rutin melakukan fasilitasi/pembinaan terhadap perhutanan sosial ini dalam bentuk Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kelompok Perhutanan Sosial melalui kegiatan Pelatihan, Workshop, Sekolah Lapang ekowisata, Coaching Clinic serta pemberian bantuan berupa Alat Ekonomi Produktif, Sarana Prasarana dan lain-lain;
- Saat ini di Kabupaten Agam terdapat kelompok Perhutanan Sosial 14 hutan nagari, 5 HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang telah mendapatkan legalitas dari Kementrian Kehutanan., dan luas hutan yang sudah

mendapat izin legalitas yaitu seluas 7,3% dari luas hutan di Kabupaten Agam;

- Secara umum, jumlah kelompok tani hutan yang dibina di Kecamatan Kamang Mudiak Kabupaten Agam sebanyak 14 Kelompok Perhutanan



Sosial. Dengan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 24 orang.

- Penangkaran Ekowisata Lebah

Madu “Trigona” KUpS Agroekowisata Sarasah Bukik Kincia Tarusan Kamang yang berada di kawasan Perhutanan Sosial di Kecamatan Kamang Mudiak Kabupaten Agam sudah terdaftar di Kemen LHK dengan No. SK- 2700/MENLHK-PSKL/PKPS.0/4/2018, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 memberikan bantuan berupa stup/kotak dan bibit lebah galo-galo sebanyak 50 stup, dari hasil penangkaran sampai saat ini 43 setup berisi, 7 stup kosong dan 26 stup siap panen;

- Kawasan Perhutanan Sosial Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam ini telah dimanfaatkan atau dikembangkan untuk beberapa usaha seperti budidaya lebah madu, ekowisata, wisata edukasi untuk pelajar/mahasiswa;
- Untuk program budidaya lebah madu ini sudah dilakukan pembinaan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Pemasaran madu baru sebatas untuk masyarakat sekitar dan beberapa permintaan dari luar yang belum terpenuhi;
- Dampak pelaksanaan kegiatan terhadap pendapatan masyarakat/petani dapat meningkatkan ekonomi masyarakat/anggota dan kesehatan serta menarik wisatawan.
- Program/kegiatan untuk mendukung perhutanan sosial di antaranya :

- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - Kegiatan Fisik dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana, Alat Ekonomi Produktif,, Pembuatan Hutan Rakyat, Tanaman Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu dll di 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Bimbingan Teknis dan Pembinaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- 
- Kendala dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dan budidaya lebah madu di antaranya:
- Masih ada lokasi/kawasan yang belum diusulkan menjadi lokasi Perhutanan Sosial dengan berbagai kendala, antara lain, belum adanya kesepahaman masyarakat di tingkat Tapak terutama memberikan keyakinan kepada kaum Adat/Ninik Mamak (karena Sumatera Barat berbasis Adat), bahwa Perhutanan Sosial dilaksanakan bukan dalam rangka mengambil atau menyerobot ulayat kaum yang bersangkutan, tetapi lebih kepada memberikan akses kelola kawasan legal kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan tidak lagi bermasalah dengan hukum apabila memasuki dan mengambil hasil hutan bukan kayu yang berada dalam kawasan hutan Negara;
 - Terkait pemasaran madu, yaitu bagaimana madu yang sudah dihasilkan oleh kelompok masyarakat terutama yang sudah mendapatkan fasilitasi dan bantuan dapat terjual dengan harga pasar yang layak dan memberikan keuntungan yang baik bagi

masyarakat, meskipun saat ini kelompok masyarakat tersebut sudah memiliki upaya sendiri dalam menyiasati permasalahan ini, dan dari Pemerintah Provinsi sendiri juga sudah dilakukan berbagai upaya seperti, pencanangan Gerakan Minum Madu Asli (GEMMA) kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat untuk mengkonsumsi madu oleh Gubernur Sumatera Barat;

- Minimnya permodalan dalam pelaksanaan kegiatan dan, kesiapan dan disiplin anggota masih kurang;
 - Masih sedikit stup/kotak untuk budidayakan sehingga hasil panen madu galo-galo belum dapat memenuhi permintaan pasar;
 - Pada tahun 2023 panen madu lebah galo-galo mencapai 1.700 liter dari 43 stup yang berisi;
 - Panen Lebah Madu galo-galo tergantung cuaca/iklim, dari Januari sampai maret 2024 berhubung musim penghujan hasil panen tidak memadai.
- Kesimpulan dan Saran : Pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dan budidaya lebah madu ini dapat meningkatkan pendapatan petani hutan; Dengan adanya bantuan pihak ke III (NgO) diharapkan dapat membantu pemasaran madu dan produk turunannya; Alat penyedot yang digunakan masih manual/tradisional, maka diperlukan bantuan berupa alat penyedot yang lebih modern, timbangan, alat pembakar mini (torth/gas portable, dll); Perlu bantuan untuk akses ke lokasi pembibitan/penangkar; dan Agar program perhutanan sosial dan budidaya lebah madu ini dapat terus dilaksanakan.

2.5. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TP-DEKON TAHUN 2024 DAN RENCANA TAHUN 2025

Tugas Pembantuan menurut PP Nomor 19 Tahun 2022 merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah provinsi. Pemerintah pusat dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam proses penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk terintegrasi dan sinkronnya kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didanai dengan dana APBN Tahun 2024, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat maupun oleh UPT/Balai Kementerian maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke UPT/Balai Kementerian yang berada di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat serta untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan tahun 2025. Berkenaan dengan itu, Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Padang

- Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tahun 2024 telah berganti nama menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Padang memiliki tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Tugas balai ini adalah Menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dengan beberapa fungsi yaitu :
 - Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

- pelaksanaan pengendalian dan pengawanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
 - pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
- BPPMHKP Padang memiliki Target Kinerja yang terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - Target kinerja pada TW III Tahun 2024 telah terapai. Berikut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPPMHKP sebesar 113,41% (sangat baik).
 - Secara umum, BPPMHKP Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan III Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama BPPMHKP Padang pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2024	Target TW-3	Realiasi TW-3	Capaian %
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu							
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	3	1	3	120
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	1	--	--	N/A
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang Produk)	3	1	1	100
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (UPI)	2	1	1	100
		5	UPI Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treceability (UPI)	2	--	--	N/A
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							
SK3.1	Terselenggaranya system pengendalian dan pengawasan mutu	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Padang (nilai)	84	84	99,31	118,2
	dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Integrasi (Lembaga)	1	--	--	N/A
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	--	--	N/A
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP							
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	86	--	--	N/A
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup satker Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82	--	--	N/A
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Padang (%)	100	--	--	N/A
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	80	100	120
		13	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,76	--	--	N/A
		14	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82	--	--	N/A
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Padang (%)	80	--	--	N/A
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Padang (%)	80	--	--	N/A

- Realisasi Anggaran BPPMHKP Padang TW III Tahun Anggaran 2024 :

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	236.000.000	49.089.671	20,80
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	121.000.000	41.808.680	34,55
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	3.970.549.000	2.880.302.474	72,54
	TOTAL ANGGARAN	4.327.549.000	2.971.200.825	68,66

BPPMHKP Padang TW III Tahun 2024 mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 2.971.200.825,- atau sebesar 68,66% dari total anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.327.549.000,-.

- Rencana untuk TA 2025 adalah adanya sertifikasi untuk 9 jenis kegiatan serta kegiatan pelayanan ekspor produk perikanan.
- Koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penerbitan sertifikat setelah dilakukan pembinaan oleh provinsi.
- Kesimpulan dan Saran : Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IKU capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada Triwulan berikutnya dapat tercapai seluruhnya dan lebih baik lagi. Sampai saat ini sinkronisasi program antara APBN dan APBD sudah dilakukan dan koordinasi dengan mitra juga berjalan dengan baik sesuai kewenangan.



2. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas

- Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BPTU-HPT Padang Mengatas merupakan satu satunya UPT Pembibitan ternak yang dikhususkan untuk memproduksi bibit sapi potong jenis Simental, Limosin dan Sapi Pesisir di Indonesia dengan jumlah lebih kurang 1200 ekor.
- Prioritas kinerja BPTU-HPT Padang Mengatas adalah peningkatan produksi bibit unggul ternak sapi potong yang berkualitas sesuai dengan mottonya “excellent breed is our priority”.
- BPTU HPT Padang Mengatas terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan jarak dari pusat kota Payakumbuh 10 Km dan dari pusat Kota Provinsi (kota Padang) 136 Km. Walaupun terletak di pinggang Gung Sago, BPTU-HPT Padang Mengatas sebahagian besar batas lahannya bersinggungan dengan pemukiman masyarakat, dengan komposisi penggunaan lahan adalah untuk pastura (padang pengembalaan) 211 Ha, kebun rumput 28 Ha, dan luas bangunan kantor, kandang dan jalan 41 Ha, lahan seluas tersebut berpotensi untuk memelihara sapi sebanyak 1.500 – 2.000 ekor sesuai dengan jenis dan bangsanya.
- BPTU-HPT Padang Mengatas mempunyai Tugas “melaksanakan pemulihan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong”.

- DIPA BPTUHPT Padang mengatas tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 79.926.828.000 dengan rincian kegiatan.
 - a. Pengembangan dan pengelolaan hasil peternakan sebesar Rp 250.000.000, yang digunakan untuk Promosi dan pendampingan pelaku usaha ekspor Rp 50.000.000,-; Sarana pengolahan hasil ikutan ternak Rp 100.000.000,-; Prasarana pengolahan hasil ikutan ternak Rp 1000.000,-.
 - b. Peningkatan produksi pakan ternak sebesar Rp 3,018,924,000, yang digunakan untuk kegiatan Produksi pakan hijauan dengan perencanaan anggaran Rp 500.000.000,-; Belanja bahan pakan untuk konsentrat dengan perencanaan anggaran Rp 2,518,924,000.
 - c. Penyediaan bibit serta peningkatan produksi ternak sebesar Rp 64,473,999,000, dengan penggunaan anggaran untuk Fasilitas PNBPN dengan kegiatan penyediaan semen beku, obat-obatan, peralatan kandang, dan peralatan pelayanan konsumen dengan anggaran Rp.1,123,999,000; penguatan sarana pendukung produksi dengan perencanaan anggaran Rp 350.000.000; Pengadaan sarana breeding center sapi potong menggunakan anggaran SBSN sebesar Rp 6,499,855,000.
 - d. Pengadaan prasarana breeding center sapi potong menggunakan anggaran BSN sebesar Rp 56,500,145,000
- Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan di BPTUHPT Padang Mengatas, dengan keluaran yang diharapkan adalah dapat meningkatkan:
 - a. Produksi bibit ternak unggul
 - b. Produksi bibit HPT rumput potong, padang penggembalaan dan leguminosa
 - c. Pelayanan teknis terhadap ternak



- d. Pelayanan pendistribusian bibit ternak
- e. Pembinaan terhadap peternak
- f. Optimalisasi layanan masyarakat
- Kendala/Permasalahan : Penetapan jumlah ternak di kelompok berdasarkan verifikasi dan kemampuan kelompok, dikarenakan program penambahan bantuan ternak dari program DKS; Pembatasan pengunjung maupun wisatawan dikarenakan fasilitas yang berada pada peternakan tersebut belum memadai untuk aktifitas wisatawan yang berkunjung, dan juga menghindari stres pada sapi-sapi yang berada diperternakan tersebut oleh aktivitas pengunjung dan biaya operasional terkait dengan pengamanan area lahan yang sangat luas sementara biaya terbatas.



3. BPSI Tanaman Buah dan Tropika

- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika (BPSI) lahir pada 30 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman buah tropika.
- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman buah tropika. Ruang lingkup tugas dan

fungsi dari BPSI Tanaman Buah Tropika yaitu: penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pelaksanaan pengujian, pengelolaan produk, layanan pengujian dan penilaian kesesuaian, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman buah tropika.

- Program strategis agrostandar di BSIP ada 3 yaitu Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.
- Secara umum, target IKU tahun 2024 sudah tercapai walaupun ada kendala terkait anggaran yang sebagian besar dialihkan ke urusan pangan, untuk perbenihan hortikultura anggarannya tidak ada.
- Pada tahun 2024 ada penambahan area tanam di beberapa daerah seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota.
- Isu yang menjadi perhatian di tahun 2025 adalah adanya penambahan mandat sesuai peraturan presiden terkait pemekaran Kementerian/Lembaga di mana ada pergantian nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian serta anggaran APBN yang terbatas dan adanya pemblokiran kategori 1 di Kementerian.
- Peluang yang bisa diambil untuk pelaksanaan kegiatan adalah menjalin kerjasama dengan mitra baru seperti yang sudah dilakukan adalah dengan PT Pupuk Indonesia. Pemda diminta untuk menyediakan lahan dan akan dibantu berupa olah tanah, penanaman dan perawatan. Target lahan di seluruh Indonesia adalah sebesar 1.000 ha.
- Kesimpulan dan Saran : Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian, Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 seluruh target telah tercapai dengan baik walaupun Sebagian anggaran ada status blokir. Sampai saat ini sinkronisasi program antara APBN dan APBD sudah dilakukan dan koordinasi dengan mitra juga berjalan dengan baik sesuai kewenangan.



4. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian/BPSIP

- Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Di samping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan di Tingkat pusat dan daerah.
- Balai penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (BSIP Sumatera Barat) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian.
- BPSIP Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Pasal 126. BSIP Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dengan fungsi : a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP Sumatera Barat.

- Program strategis agrostandar di BPSIP ada 3 yaitu Program Agro Standar, Program Pengujian Instrumen Pertanian, Program Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian dan Program Penyediaan Benih Terstandar dan Bersertifikat.
- Program Agro Standar merupakan program strategis dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.
- BPSIP melaksanakan program pengujian instrumen pertanian. Instrumen pertanian adalah: 1) alat dan mesin pertanian yang dipakai pada onfarm dan for farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin: pengelolaan, budi daya, panen, dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian termasuk alsin yang berbasis AI, IoT, dan Cyber Physical System); 2) sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); 3) unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; 4) dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.
- BPSIP melakukan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu instrumen pertanian (barang, jasa, sistem, proses, dan personal) telah sesuai dengan Persyaratan Acuan. Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Persyaratan Acuan merupakan dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

- Program Penyediaan Benih Terstandar dan Bersertifikat merupakan salah satu program utama BPSIP dalam menjamin mutu keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian melalui ketersediaan benih/bibit terstandar dan bersertifikat. BSIP memiliki sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam melaksanakan produksi benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung capaian produksi nasional.

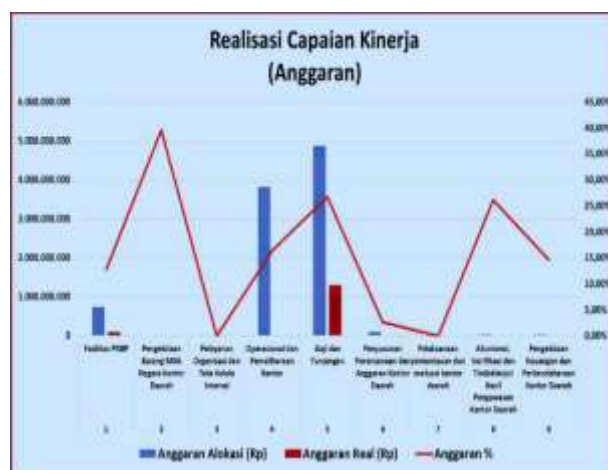
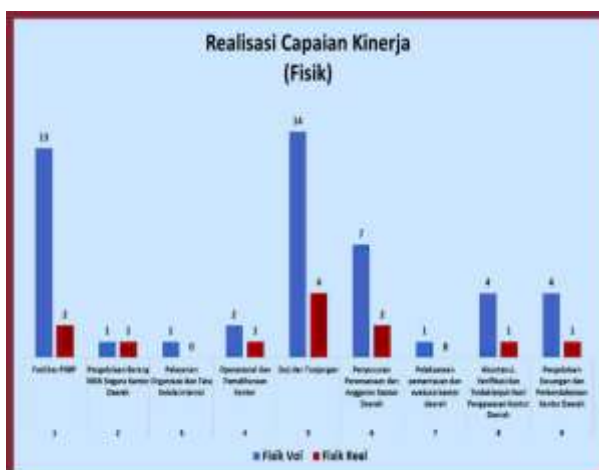


5. Balai Veteriner Bukittinggi

- Balai Veteriner Bukittinggi adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat.
- Balai Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian diagnosa, serta pengujian Veteriner dan produk hewan. Wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi meliputi empat propinsi yaitu Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.
- Balai Veteriner Bukittinggi merupakan Laboratorium Kesehatan Hewan tipe A. Provinsi mempunyai Laboratorium tipe B. Selain itu masih ada Laboratorium Kesehatan Hewan tipe C yang berkedudukan di tingkat

kabupaten/kota. Pembagian tipe ini didasarkan pada perbedaan kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing Laboratorium, karena perbedaan peralatan/fasilitas yang dimiliki dan perbedaan jumlah tenaga/personalia.

- Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan kode LP-140-IDN sejak bulan Desember 2002 untuk SNI ISO 17025. Masa berlaku akreditasi adalah selama 4 tahun dan telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 17 Juli 2027.
- Saat ini seluruh laboratorium yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi memiliki jenis pengujian yang terakreditasi. Sebanyak 50 jenis pengujian (diagnosa penyakit) yang dilakukan oleh laboratorium Parasitologi, Patologi, Bakteriologi, Virologi, Bioteknologi dan Kesmavet.
- Peranan Balai Veteriner Bukittinggi dalam melaksanakan sasaran strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melaksanakan kegiatan surveilans, penyidikan penyakit, diagnosa laboratorium penyakit hewan dengan melaksanakan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan.
- Program Balai Veteriner yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Pada tahun 2024 terjadi pemotongan anggaran sehingga kegiatan pengawasan mutu dan keamanan produk hewan hanya dapat dilakukan terhadap sampel pasif.
- Berikut target dan realisasi capaian kinerja TW I Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2024 :



- Laporan hasil pemantauan pelaksanaan rencana Pembangunan tahun anggaran 2024 s/d Oktober 2024 beserta kendala dan permasalahan :

N o	Uraian Kegiatan	Pagu Belanja	Realisasi s/d Bulan Ini	% THP Pagu Belanja	Permasalahan	Keterangan
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan						
1	Fasilitas PNPB	736.998.000	413.661.378	56,13	Tidak ada masalah	Kegiatan sesuai rencana
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjennak	8.400.350.000	6.795.107.162	80,89	Tidak ada masalah	Kegiatan sesuai rencana
3	Layanan Dukungan	8.318.590.000	6.730.649.916	80,91	Tidak ada masalah	Kegiatan sesuai rencana

N o	Uraian Kegiatan	Pagu Belanja	Realisasi s/d Bulan Ini	% THP Pagu Belan ja	Permasala han	Keteran gan
	Manage men Internal					
4	Layanan Manage men Kinerja Internal	81.760.00 0	64.457.24 6	78,84	Tidak ada masalah	Kegiatan sesuai rencana

- Rencana Program dan Kegiatan TA 2025 adalah akan ada Pembangunan Gedung untuk laboratorium terpadu dengan anggaran sekitar 53 M bekerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, dengan adanya program makan bergizi serta minum susu yang dicanangkan oleh Presiden terpilih maka akan ada rencana pengembangan sapi perah. Saat ini baru ada di daerah Sirukam Kab. Solok yang dikelola oleh swasta. Ke depan, ada arahan untuk penyediaan lahan di Sumatera Barat minimal seluas 100 ha untuk selanjutnya dikembangkan oleh investor terkait pengembangan sapi perah.
- Kendala yang ada saat ini adalah terkait anggaran yang terbatas sehingga di tahun 2024 tidak ada peta penyakit hewan.
- Dukungan dari pemda yang diharapkan adalah penyediaan data yang akurat di kabupaten/kota dan dukungan anggaran operasional untuk pelaksanaan kegiatan, seperti vaksinasi. Saat ini anggaran untuk penyediaan vaksin sudah tersedia sementara dana untuk operasional penyuntikkan tidak ada sehingga tidak ada pelaporan secara berkala terkait kegiatan vaksinasi.
- Pada awal tahun rutin dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait sinkronisasi program APBN dan APBD melalui rapat koordinasi.

- Kesimpulan dan Saran : Dalam pelaksanaan tupoksi Balai Veteriner melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan salah satu penunjang keberhasilan Program Pembangunan Peternakan yang didasari Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan “Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.
- Dalam pelaksanaan program Balai Veteriner Bukittinggi ditunjang dana APBN yang kurang dengan beberapa kendala yang dihadapi.
- Bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah yang diharapkan adalah dukungan anggaran operasional untuk pelaksanaan kegiatan, seperti vaksinasi.
- Sampai saat ini sinkronisasi program antara APBN dan APBD sudah dilakukan dan koordinasi dengan mitra juga berjalan dengan baik sesuai kewenangan.



2.6. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 LINGKUP BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi DAK Fisik Tahun 2024 Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5,27 miliar yang terdiri atas kegiatan :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- b. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi

Salah satu fungsi Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah yang mencakup pemantauan terhadap realisasi anggaran, pelaksanaan fisik kegiatan, serta pencapaian hasil yang telah ditetapkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berkenaan dengan itu, Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota tersebut dengan hasil sebagai berikut :

a. Kota Pariaman (UPTD KPSDKP)

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke UPTD KPSDKP (Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nama pekerjaan : Belanja Modal Pembangunan Pondok Informasi dan Papan Informasi, Rehabilitasi Gapura, Pagar dan Hatchery II
- Lokasi : Kota Pariaman
- Anggaran : Rp. 1.354.497.584,-
- Pelaksana : CV. Nadira
- Tanggal kontrak : 16 Juli 2024 s/d 12 Desember 2024

- OPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
- Bentuk pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan : Pembangunan pondok informasi, Pembangunan papan informasi/landmark, rehabilitasi gapura dan pagar serta rehabilitasi hatchery II dan hatchery karantina.
- Sampai saat dilakukan monitoring dan evaluasi, pekerjaan telah terealisasi sebesar 96%.
- Pencairan dana dilakukan secara lumpsum, yaitu Tahap I pada bulan Juli 2024 sebesar Rp. 406.349.275,20 dan Tahap II pada tanggal 28 Oktober 2024 sebesar Rp. 521.481.569,84.
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah pihak desa tidak memperbolehkan melanjutkan Pembangunan pagar batas arah Manggur sehingga volume pekerjaan dialihkan untuk penyempurnaan/maksimalisasi pada rehabilitasi hatchery II dan hatchery karantina.
- Pekerjaan dapat diselesaikan sebelum batas waktu, diperkirakan selesai pada tanggal 30 November 2024.
- Sesuai kondisi bobot pekerjaan sampai tanggal 20 November 2024 yang sudah sebesar 96% kemungkinan tidak akan ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Harapan atau tindak lanjut dari pelaksanaan pekerjaan adalah untuk Pembangunan fisik dengan Dana Alokasi Khusus juga dapat dibantu dengan dana penunjang dari APBD untuk sarana prasarana bangunan.
- Kesimpulan dan Saran : Pelaksanaan fisik pekerjaan sudah terealisasi sebesar 96% sampai akhir November 2024 di mana untuk Pembangunan dan rehabilitasi pagar serta pembangunan papan informasi (landmark) sudah selesai dikerjakan. Untuk Pembangunan pondok informasi serta hatchery sedang proses pemasangan kusen kaca. Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan sudah terealisasi dalam 2 tahap dan sedang proses untuk salur tahap III. Hasil dari pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal baik pada pihak UPTD maupun pada Masyarakat pada umumnya.



b. Nagari Limau Gadang, Lumpo, Kapa Kabupaten Pesisir Selatan

- Monitoring dan evaluasi dalam rangka melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Ke Nagari Limau Gadang, Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Nama pekerjaan pengadaan perlengkapan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.875.960,- untuk 4 Pokmaswas di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Sijunjung dan Kab. Pasaman Barat.

- Untuk Kabupaten Pesisir Selatan Pokmaswas yang menerima bantuan adalah Pokmaswas Batu Carano Nagari Limau Gadang, Lumpo di Kecamatan IV Jurai. Bantuan yang diterima berupa peralatan dan perlengkapan, yaitu :

- □Rompi : 10 unit
- □Handlamp : 4 unit
- □Kamera waterproof : 1 unit
- □GPS : 1 unit
- □Handt Talky : 2 unit
- □Teropong binocular : 2 unit
- □Topi/pet Pokmaswas : 10 unit
- □Sepatu bot : 10 unit
- □Papan nama pokmaswas: 1 unit



- Yang diserahkan sekaligus dengan realisasi pekerjaan sudah 100%. Pada pelaksanaan pekerjaan tidak ada kendala dengan dilaksanakan tepat waktu dan serah terima pekerjaan pada tanggal 16 September 2024.
- Barang-barang yang diterima tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan bantuan bibit ikan kegiatan restocking di perairan sungai Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pokmaswas juga mengusulkan bantuan pembuatan bangunan posko untuk restocking di perairan sungai.
- Saran dan masukan serta tindak lanjut dari pekerjaan yang diharapkan adalah diharapkan kedepannya bantuan yang diberikan agar dapat diberikan bimbingan dalam penggunaan dan operasional alat-alat yang diberikan dan Pokmaswas berterima kasih atas bantuan yang diberikan.

c. Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat

- Monitoring dan evaluasi dalam rangka melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik Tahun 2024 Ke Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Nama pekerjaan pengadaan perlengkapan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.875.960,- untuk 4 Pokmaswas di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Sijunjung dan Kab. Pasaman Barat.

- Untuk Kabupaten Pasaman Barat Pokmaswas yang menerima bantuan adalah Pokmaswas Mifahul Jannah Nagari Kapa di Kecamatan Luhak Nan Duo. Bantuan yang diterima berupa peralatan dan perlengkapan, yaitu :

- ☐ Rompi : 10 unit
- ☐ Handlamp : 5 unit
- ☐ Kamera waterproof : 1 unit
- ☐ GPS : 1 unit
- ☐ Handt Talky : 2 unit
- ☐ Teropong binocular : 2 unit
- ☐ Topi/pet Pokmaswas : 10 unit
- ☐ Sepatu bot : 10 unit
- ☐ Papan nama pokmaswas: 1 unit



- Yang diserahkan sekaligus dengan realisasi pekerjaan sudah 100%. Pada pelaksanaan pekerjaan tidak ada kendala dengan dilaksanakan tepat waktu dan serah terima pekerjaan pada tanggal 16 September 2024.
- Saran dan masukan serta tindak lanjut dari pekerjaan yang diharapkan adalah diharapkan kedepannya bantuan yang diberikan agar dapat diberikan bimbingan dalam penggunaan dan operasional alat-alat yang diberikan dan Pokmaswas berterima kasih atas bantuan yang diberikan.

d. Kabupaten Sijunjung

- Monitoring dan evaluasi dalam rangka melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Ke Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Nama

pekerjaan pengadaan perlengkapan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.875.960,- untuk 4 Pokmaswas di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Sijunjung dan Kab. Pasaman Barat.

Untuk Kabupaten Sijunjung Pokmaswas yang menerima bantuan adalah Pokmaswas Latang Limbago Alam Nagari Latang di Kecamatan Lubuk Tarok. Bantuan yang diterima berupa peralatan dan perlengkapan, yaitu :

- □ Rompi : 10 unit
- □ Handlamp : 5 unit
- □ Kamera waterproof : 1 unit
- □ GPS : 1 unit
- □ Handt Talky : 2 unit
- □ Teropong binocular : 2 unit
- □ Topi/pet Pokmaswas : 10 unit
- □ Sepatu bot : 10 unit
- □ Papan nama pokmaswas : 1 unit



Yang diserahkan sekaligus dengan realisasi pekerjaan sudah 100%. Pada pelaksanaan pekerjaan tidak ada kendala dengan dilaksanakan tepat waktu dan serah terima pekerjaan pada tanggal 30 September 2024

Saran dan masukan serta tindak lanjut dari pekerjaan yang diharapkan adalah diharapkan kedepannya bantuan yang diberikan dapat dialokasikan untuk semua anggota yang ada sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, melaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam sangatlah penting, karena melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan bidang SDA. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang SDA pada tahun 2024 pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan yang telah disusun sehingga hasil pelaksanaan sub kegiatan secara substansi dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan sudah dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

LAMPIRAN

1. Surat Undangan Rapat Koordinasi verifikasi dan validasi data P3KE
Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 29 Januari 2024

Nomor : 050/12/I/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

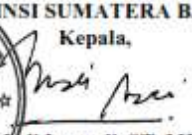
Kepada Yth. :
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 dan surat Nomor 12/TS.03.03/K/1/2024 tanggal 10 Januari 2023 perihal Penyampaian Data P3KE untuk Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2024, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 31 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Thamrin Nurdin Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda : 1. Koordinasi verifikasi dan validasi data P3KE Penerima Bantuan
Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024
2. Hal-hal lain yang dirasa perlu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Hedi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang

Lampiran 1**Surat Nomor : 050/12/I/EKO-SDA/Bappeda-2024****Tanggal : 29 Januari 2024****Kepada Yth. Bapak/Ibu:**

No	Peserta Rapat	Jumlah
1	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 orang
2	Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat	10 orang
3	Kepala Kantor Pos Cabang Utama Padang	2 orang
4	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	2 orang
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	2 orang
5	Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	38 orang
6	Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	38 orang
7	Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	1 orang
8	Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat	1 orang
9	JFP dan pelaksana Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	24 orang
10	Perwakilan BRAC Sumatera Barat	1 orang
	Total	120 orang

2. Sambutan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Koordinasi verifikasi dan validasi data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024
-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SAMBUTAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DISAMPAIKAN PADA
RAPAT KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA P3KE PENERIMA
BANTUAN PANGAN BERAS TRIWULAN I TAHUN 2024
Padang, 31 Januari 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth. Sdr. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat,
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pos Cabang Utama Padang,
Yth. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat,
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat,
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat,
Yth. Undangan, Hadirin dan Hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat dan Kepala Kantor Pos Cabang Utama Padang serta seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada acara ini.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu, permasalahan stunting juga perlu mendapat perhatian. Penurunan angka stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Hadirin yang berbahagia,

Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan tanggal 6 November 2023, penyaluran CPP untuk pemberian bantuan

pangan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, dan menurunkan stunting.

Hadirin yang berbahagia,

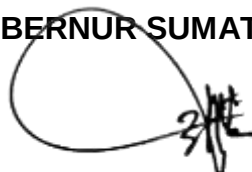
Dengan telah ditetapkannya surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 372/TS.03.03/K/11/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka bantuan pangan beras dan surat Nomor 12/TS.03.03/K/1/2024 tanggal 10 Januari 2023 perihal Penyampaian Data P3KE untuk Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2024, maka akan segera dilakukan percepatan penyaluran bantuan pangan Tahap 1 bulan Januari-Maret 2024.

Untuk itu perlu bersama-sama kita melakukan koordinasi verifikasi dan validasi data *by name and by address* (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk bantuan pangan beras dengan perangkat daerah terkait.

Akhirnya marilah kita berserah diri kepada Allah SWT, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk tetap berkomitmen menjalankan roda pembangunan. Dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmaanirrahiim*” acara Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatian yang diberikan, wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

3. Surat Gubernur untuk Percepatan Verifikasi dan Validasi Data P3KE



GOVERNOR OF WEST SUMATRA

Padang, 30 January 2024

Nomor : 050/12/1/Eko-SDA/Bappeda-2024
 Lampiran : -
 Perihal : Percepatan Verifikasi dan Validasi Data P3KE

Kepada Yth. :
 Bupati/Walikota
 Se-Sumatera Barat
 di
 Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penyaluran Cadangan Pangan untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menyatakan bahwa penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan;
2. Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi yang sumber datanya berasal dari data P3KE yang sudah diverifikasi dan divalidasi pada masing-masing Kabupaten/Kota;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara melalui Bappeda Kabupaten/Kota untuk segera melakukan percepatan verifikasi dan validasi data *by name and by address* (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk bantuan pangan beras di Provinsi Sumatera Barat. Terhadap data yang sudah lengkap baik nama, NIK, dan alamatnya dapat langsung dilakukan penyaluran tanpa dilakukan verifikasi dan validasi data setelah dinyatakan sah oleh Bulog.
4. Dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian PMK di Jakarta
2. Kepala Bapenas di Jakarta
3. Kepala Bulog Wilayah Sumbar di Padang

4. Notulen Rapat Koordinasi verifikasi dan validasi data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024

NOTULEN RAPAT

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Rabu, 31 Januari 2024 Ballroom Thamrin Nurdin Bappeda Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/12/II/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 29 Januari 2024
Pimpinan Rapat	:	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Peserta Rapat	:	1. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat 2. Kepala Kantor Pos Cabang Utama Padang 3. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 5. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 6. Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 7. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	:	Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data P3KE Penerima Bantuan Pangan Beras Triwulan I Tahun 2024
Pembahasan	:	1. Pembukaan oleh Kabid Ekonomi dan SDA Pemerintah mempunyai 2 agenda pokok, yaitu isu kerawanan pangan dan menurunkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024. Tantangan : kebutuhan pangan terpenuhi dan kemiskinan menurun. Harapan kita adalah tersedianya pangan yang cukup sehingga risiko stunting di masyarakat dapat berkurang. Pemerintah melalui Bapanas menyediakan penyaluran

	bahan pangan beras kepada penduduk miskin, rawan pangan dan berisiko stunting. Kelompok penerima wajib masuk data P3KE yang dikeluarkan Kemenko PMK. Bulog melalui Bapanas memperoleh data P3KE dari Kemenko PMK. Bappeda Kab/Kota agar memverifikasi data P3KE agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Daerah yang sudah meng-SK kan data P3KE: Sawahlunto, Solok, Payakumbuh. Validasi dan verifikasi data dilakukan terhadap yang sudah meninggal/pindah/sudah mampu. Program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, namun persentase kemiskinan di Sumbar naik dari 5,92% menjadi 5,96% di 2023, walaupun kemiskinan ekstrem menurun. Tentu ada permasalahan terkait ini, seperti ketepatan penyaluran. 2. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat “Sosialisasi Bantuan Pangan Beras Tahun 2024” Tahun 2023 sudah dilakukan program bantuan cadangan pangan beras. Untuk tahun 2024 ini (tahun kedua), ada arahan agar Bappeda ikut mengawal terkait basis data penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan triwulan I harus dilakukan segera dalam waktu dekat. Program bantuan pangan dapat mengurangi beban pengeluaran PBP, Upaya mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menurunkan stunting, mengendalikan inflasi dan melindungi konsumen.
--	---

	Jumlah bantuan adalah sebesar 10 kg. Harapannya : tahap I selesai di Maret 2024. Alokasi untuk Provinsi Sumbar : 393.913 KPM PBP. Transporter bantuan pangan tahun 2024 adalah PT Pos. Perlu ada berita acara serah terima data P3KE agar PT. Pos dapat segera menyalurkan bantuan. Proses veri-vali data dilakukan terhadap data yang masih dispute (sengketa). Terhadap data dispute, data dilengkapi dan atau diganti menggunakan data P3KE. Jika data P3KE tidak tersedia maka dapat menggunakan DTKS yang dilengkapi NIK. 3. PT Pos Padang Realisasi s/d hari ini dari 491.067 PBP, sudah tersalurkan sebanyak 35.080 PBP (8,14%) Yg terbanyak ada di Kabupaten Agam. Daerah yang belum lengkap : Padang Panjang, Dharmasraya dan Tanah Datar, sehingga belum terdistribusi. Khusus untuk Mentawai, langsung dialokasikan untuk 3 bulan. 4. Dinas Pangan Provinsi Perlu dukungan kita semua untuk penyaluran bahan pangan ini. Adanya perubahan juknis harus kita perhatikan Bersama. Peran dinas pangan di kabupaten/kota cukup besar dalam proses penyaluran, perlu kolaborasi bersama.
--	--

	Kemasan dan pelabelan perlu diperhatikan. Diskusi : 1. Bapelitbangda Padang Pariaman (Azwarman) Pedoman yang dipakai adalah juknis terbaru. Data yang dipakai adalah data P3KE yang diterima Bapanas dari Kemenko PMK, berarti bukan data yang ada di Bappeda Kab/Kota. Jika disandingkan data tersebut, jumlahnya jauh berbeda. Data kemiskinan ekstrem : 7.492 (sebelum verifikasi). Setelah verifikasi : 6.013 keluarga. Dari juknis, tidak perlu dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga tidak perlu berita acara. 2. Bappeda Solok Selatan Solok Selatan sudah menyandingkan data P3KE dan bulog. Terdapat 2.000 yang tidak cocok. Apakah ini bisa diambil dari data nagari yang dikumpulkan tapi tidak masuk data P3KE dan DTKS. Di daerah yang verifikasi adalah Dinas Sosial, diharapkan Dinas Sosial diikutkan dalam acara ini agar mengetahui amanat dan mekanismenya. 3. Dinas Pangan Sawahlunto Persoalannya sama yaitu data P3KE Kemenko PMK. Ada selisih dengan data Bulog, yaitu sebesar 493. Yang sama hanya 78%. Apakah tetap disalurkan? Harusnya tetap ada verifikasi dan validasi karena ada kemungkinan terjadinya tidak tepat sasaran bantuan. Cek kualitas barang sampai penerima seperti apa, apakah hanya dari luar saja atau bisa sampai ke isi karung?
--	---

	Tanggapan Bulog : Pertemuan ini dirancang sebelum keluarnya perubahan juknis. Tujuannya agar pihak terkait bisa melaksanakan tugas sesuai perannya. BNBA sudah lengkap dan sesuai sehingga bisa disalurkan. Jika ada dispute, maka perlu verifikasi dan validasi yang disertai berita acara. Pada penajaman juknis perubahan (ketentuan II) ada mekanisme penggantian. Untuk tahap I ini agar disalurkan dulu, setelah itu akan dilakukan pertemuan untuk evaluasi. Tanggapan Bappeda: Data P3KE secara nasional dikelola oleh TNP2K yang didistribusikan ke daerah melalui Bappeda Provinsi dan Kab/Kota. Hak akses dan Kelola data ada di Bappeda. Data P3KE sudah dipadupadankan dengan DTKS dan data stunting (sudah hampir 80%). Data P3KE disasar untuk kemiskinan ekstrem, sementara DTKS memiliki 26 kriteria. Kemenko PMK dan Bapanas sudah ada MoU terkait data P3KE ini. Data inilah yang diberikan ke Bulog sebagai user. Apabila ada perbedaan data maka itulah peran Bappeda untuk verifikasi dan validasi. Pengawasan penyaluran bahan pangan dilakukan oleh Dinas Pangan. 4. Kabid PPM Butuh persamaan persepsi terkait verifikasi (sampai desil berapa) serta data yang digunakan (apakah data dari Bapanas atau dari Kabupaten/Kota). Harapannya data yang digunakan valid dan tepat sasaran.
--	---

	5. Bappeda Tanah Datar Tanah Datar terlambat menandatangani berita acara karena adanya perbedaan penggunaan data. Peran Dinas Pangan : mengecek kuantitas. Saat ini ditambah lagi mengenai verifikasi dan validasi. Jika tidak ada berita acara, maka Bulog tidak bisa menyalurkan bantuan. Agar isi berita acara bisa diperbaiki. 6. Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman dilanda bencana dan saat ini masih masuk tanggap darurat, sehingga masuk daerah khusus. Program CPP ini sudah dilaksanakan sejak 2023, hanya terjadi perubahan kewenangan. Permasalahan yang ada adalah perbedaan data. Sampai saat ini, tidak ada permasalahan. Hanya terkait administrasi di mana tidak melibatkan dinas social lagi. Saran : tetap melibatkan Dinas Sosial. Tanggapan : Bappeda Provinsi Data 2024 sudah padu padan dengan data DTKS dan stunting. Bulog tidak mengetahui terkait data karena hanya sebagai user. Terkait data error itulah yang dilakukan verifikasi dan validasi. Data Musrenbang Nagari dapat dipakai. Bulog Persamaan persepsi perlu dilakukan sesuai juknis. Bulog menerima data dari Bapanas sudah BN BA sehingga tidak bisa merubah. Perum bulog Bersama Dinas Pangan bekerjasama dengan Bappeda.
--	---

Kesepakatan/ Tindak Lanjut	:	1. Agar Bappeda Kabupaten/Kota mengawal proses verifikasi dan validasi data P3KE. 2. Program penyaluran bantuan pangan ini harapannya tepat sasaran. 3. Data yang dispute saat penyaluran akan diverifikasi ulang dan ada berita acara. 4. Agar kita bersama siap mendukung program pemerintah, khususnya terkait kolaborasi data. 5. Untuk penyaluran, dan pengawasan akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk evaluasi. 6. Data Bulog dijadikan baseline.
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,



Dela Resina

5. Nota Dinas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ke Kabupaten/Kota

BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Tanggal : 19 Juni 2024
Nomor : 050/156/ND/Eko-SDA/Bappeda/6/2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Izin Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar kuesioner terlampir.
4. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke Kabupaten Limapuluh Kota dengan menugaskan Rosalinda, SS, MM, Linda Firani, Amd (Pelaksana) dan Fauzi (sopir) dengan melakukan perjalanan dinas ke kabupaten Limapuluh kota pada tanggal 21 Juni 2024.
5. Pembiayaan kegiatan ini telah dialokasikan pada DPA Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak, terimakasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Ir. Benny Sakti, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19670927 199403 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

6. Kuesioner/Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ke Kabupaten/Kota



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Khatib Sulaiman No. 25 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
 Fax. 7055676 Website: bappeda.sumbarprov.go.id
PADANG

INSTRUMEN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/ Kota :

Alamat :

1. Penyusunan SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (*khusus Kepala Daerah (KDH) yang dijabat oleh PJ maka diminta untuk merevisi SK TKPK dengan menjadikan Sekda sebagai Ketua TKPK, Surat Mendagri Nomor 400.4.7/1163/Bangda pada tanggal 24 Oktober 2023*) :
 - Kepala Daerah saat ini dijabat oleh PJ Bupati/Walikota : **Ya / Tidak.**
 - Penyusunan SK : **Sudah / Dalam Proses / Belum, keterangan :**
2. Penyusunan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan :
 - RPKD : **Sudah / Dalam Proses / Belum, disampaikan ke Provinsi : Sudah / Belum.**
Keterangan :
 - RAT 2024 : **Sudah / Dalam Proses / Belum, disampaikan ke Provinsi : Sudah / Belum.**
Keterangan :
 - LP2KD 2023 : **Sudah / Dalam Proses / Belum, disampaikan ke Provinsi : Sudah / Belum.**
Keterangan :
3. Pelaksanaan pemutakhiran data P3KE 2024 ke KemenkoPMK : **Sudah / Belum.**
Keterangan :
4. Pelaksanaan Tindaklanjut data **P3KE 2023** oleh Kabupaten/Kota :
 - Verifikasi dan validasi data P3KE BNBA : **Sudah / Dalam Proses / Belum.**
 - Penetapan SK oleh Kepala Daerah : **Sudah / Dalam Proses / Belum.**
 - Disampaikan ke Provinsi : **Sudah / Belum.**
 - Informasi permasalahan/ kendala yang dihadapi :

5. Pelaksanaan Tindaklanjut data **P3KE 2024** oleh Kabupaten/Kota :
- Penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 : **Sudah / Dalam Proses / Belum.**
 - Penetapan SK oleh Kepala Daerah : **Sudah / Dalam Proses / Belum.**
 - Disampaikan ke Provinsi : **Sudah / Belum.**
 - Informasi permasalahan/ kendala yang dihadapi :
 -
 -
6. Pelaksanaan Pelaporan PPKE secara online Triwulan I Tahun 2024 : **Sudah / Belum**
- Informasi permasalahan/ kendala yang dihadapi :
 -
 -
7. Update informasi Perkembangan Dokumen Kemiskinan Kabupaten/Kota (<https://bit.ly/InfoDokKemiskinan2024>) : **Sudah / Belum**
(jika belum/belum lengkap agar segera dilakukan update informasi melalui link diatas).
8. Upload Dokumen Kemiskinan Kabupaten/Kota (<https://bit.ly/DokKemiskinan2024>) : **Sudah / Belum**
(jika belum/belum lengkap agar segera dilakukan update informasi melalui link diatas).
9. Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :
- Total alokasi pagu : Rp.
 - Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran : Rp.
 - Strategi Meningkatkan Pendapatan : Rp.
 - Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan : Rp.
 - File excel (data dapat ditarik berdasarkan tagging dari SIPD) mohon diupload di <https://bit.ly/DokKemiskinan2024> sesuai dengan Kabupaten/Kota.
10. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah oleh Kabupaten/Kota : **Sudah / Belum.**
11. Perkiraan pelaksanaan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun.....Kali yang akan dilaksanakan pada :

IDENTITAS RESPONDEN :

Tanggal	:		Tanda Tangan
Nama	:		
NIP	:		
Jabatan	:		

7. Nota Dinas Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD PG) Ke Kabupaten/Kota

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Melalui : Yth. Sekretaris
 Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
 Tanggal : 03 Juli 2024
 Nomor : 050/179/ND/Eko-SDA/Bappeda/7/2024
 Lampiran : 1 Dokumen
 Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mohon Izin Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Ke Kabupaten Agam

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima (5) tahun.
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyatakan bahwa RAD PG provinsi atau RAD PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
3. Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
4. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG di Kabupaten/Kota.
5. Berdasarkan hal tersebut diatas, direncanakan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Agam, dan mohon persetujuan Bapak untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menugaskan : Dela Resina, S.Farm, ME (Fungsional Perencana ahli Muda), Nizhamul Bastian, SH dan Muslim Libtiandra, SE (Pelaksana) dengan melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Agam pada tanggal 9 Juli 2024
6. Anggaran pelaksanaan kegiatan tersedia pada kegiatan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Ir. Benny Sakti, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670927 199403 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

8. Kuesioner/Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD PG) Ke Kabupaten/Kota



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

INSTRUMENT PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN 2024 DI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota : _____

- Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi?
 - Ya
 - Tidak
- Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah?
 - Sudah
 - Belum
- Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG?
 - Sudah
 - Belum
- Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG?



*beri tanda pada masing-masing tahapan

- Sudah
 - Belum
- Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG?
 - Sudah
 - Belum
 - Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG?

.....

.....

.....

- Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG?

.....

.....

.....

IDENTITAS RESPONDEN :

Tanggal	1		Tanda Tangan
Nama	2		
NIP	3		
Jabatan	4		

9. Rekap Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD PG) Ke Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kab. Agam	√		√				langkah 1-2 (pembahasan teknis		√		√	1 belum memahami	melakukan koordinasi dengan OPD

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
								penyusunan RAD PG)					tujuan penyusunan 2 koordinasi tidak maksima	terkait

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													I	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
2	Kab. Padang Pariaman	√			√	√		-		√		√	secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam penyusunan dokumen RAD PG,	Bapelitbangda kab. Padang pariaman akan melaksanakan RAD PG pada triwulan
Laporan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2024														

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
3	Kab. Pasaman	√		√				-	√		√		Dalam penyusunan RAD-PG awalnya ada beberapa kendala,	Rancangan RAD-PG kabupaten Pasaman akan disesuaikan dan
													salah satu kendalanya adalah tim	disempurnakan kembali sejalan dengan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
4	Kab. Pasaman Barat				√		√	-		√		√	belum mengetahui kewajiban untuk menyusun RAD PG	menindaklanjuti dengan mempelajari pedoman penyusunan RAD PG

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
5	Kab. Limapuluh kota	√		√		√		langkah 3-8	√		√		penyusunan dokumen RAD PG bersamaan dengan penyusunan	rencananya RAD PG tahun pelaksanaan dan pengesahann

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													n 5 dokumen perencanaan sehingga matrik	ya sejalan dengan RPJMD yang akan datang

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													kebijakan sedikit terlambat	
6	Kab. Tanah Datar	√			√	√		langkah 3-8 (penyusunan rencana aksi		√		√	susah koordinasi dengan	penyusunan SK Tim

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
								masing-masing OPD)					OPD	
7	Kab. Sijunjung	√			√	√		langkah 1-2		√		√	kurangnya pemahaman OPD terhadap	penyusunan SK Tim

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													strategis	
8	Kab. Solok	√			√	√		-		√		√	kurangnya pemahaman OPD terhadap penyusunan	penyusunan SK Tim

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													n RAD PG terutama dalam penyusunan tujuan strategis	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
9	Kab. Pesisir Selatan	√		√		√		langkah 1-2 dan langkah 3-8	√		√		1 kurangnya pemahaman OPD terhadap	1 meminta fasilitasi Provinsi terhadap penyusunan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan RAD PG	RAD PG terutama dalam penyusunan RAD PG terutama dalam penyusunan RAD PG

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													nan tujuan strategis	
													2 kurangnya semangat	2 menyusun rencana akhir

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													at perencanaan dan evaluasi pada	3 sosialisasi rencana akhir bersama OPD terkait

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													ASN	
10	Kab. Kep. Mentawai	√		√				langkah 1-2 dan langkah 3-8	√		√		beberapa OPD pemangku kepentingan belum	menghubungi langsung OPD terkait pemangku kepentingan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													ada yang belum respon terkait pengiriman matriks	ke kantornya dan mengisi data yang dibutuhkan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													penajaman strategi RAD PG	
11	Kab. Solok Selatan		√		√	√		-		√		√	belum ada terbentuk tim	mempelajari dan mensosialisa

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
														sikan kepada OPD serta membentuk tim

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1	Kab.	√		√		√		langkah 1-2	√			√	kegiatan	akan
2	Dharmasraya												penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara	dilaksanakan tahapan proses sesuai dengan pentahapan penyusunan
Laporan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2024														
													bersamaan RAD PG oleh tim penyusun RAD PG kab. Dharmasraya dan harus diselesaikan pada	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
13	Kota Padang		√		√	√		-		√		√	kurangnya pemahaman OPD terhadap penyusunan RAD PG	Penyusunan SK tim

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													terutama dalam penyusunan tujuan strategis	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
14	Kota Bukittinggi	√		√				langkah 1-2 dan langkah 3-8	√		√		terbatasnya anggaran untuk rapat-rapat	akan dilakukan penyempurnaan draft/finalisasi dokumen

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
														RAD PG serta akan melakukan penyelesaian RAD PG dalam

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
														peraturan Kepala Daerah

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
15	Kota Payakumbuh	√			√	√		-		dalam proses		√	belum ada kab/kota yang melaksanakan penyusunan	mengadakan rapat

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													n RAD PG, jadi tidak ada tempat untuk berdiskusi	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
16	Kota Solok	√			√	√		langkah 1-2		√		√	masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait	segera disiapkan pembuatan SK tim penyusunan RAD PG

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													karena banyaknya kegiatan penyusunan dokumen	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													perencanaan yang harus diselesaikan (RPJPD, RPJMD,	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													RKPD)	
17	Kota Sawahlun	√		√		√		langkah 1-2	√			√	1 RAD PG disusun	pada tahun 2025 akan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
	to												berdasarkan periodisasi RPJMD, dibutuhkan	dilaksanakan penyusunan RAD PG tersebut simultan dengan RPJM

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													an dukungan anggaran dan kebijaka	D Kota Sawahlunto

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													n untuk bisa menyelaraskan penyusunan	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													dokumen RPJMD ke dalam RAD PG	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													yang dijadikan rujukan terkait tentang pangan	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													dan gizi	
													2 berkoordinasi dengan OPD terkait	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													3 pendampingan atau fasilitasi dari pemerintah	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													ah Provinsi dalam menyusun RAD PG	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
18	Kota Pariaman	√		√		-	-	langkah 1-2 dan langkah 3-8 (penyusunan Rencana Aksi oleh masing-	√			√	1 menyesuaikan program kegiatan OPD yang	Penyelesaian draft RAD PG

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
								masing OPD dan mendiskusikan rencana aksi pada masing-					terbatas guna mendukung TS1-TS4 yang	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
								masing pokja, tujuan strategis dan penulisan rancangan RAD PG					terdapat dalam lembar kerja matriks aksi	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													RAD PG	
													2 keterbatasan data,	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													seperti pada tabel indikator dan sasaran	

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													di BAB III	
19	Kota Padang Panjang	√				-	-	-				√	menyesuaikan dengan waktu /	akan menyusun RAD PG sejalan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
													periode RPJMD 2025-2029	dengan penyusunan Renstra OPD dan akan diselaraskan dengan

No	Kabupaten/kota	Apakah mengikuti sosialisasi penyusunan RAD PG tanggal 18 Oktober 2023 di Bukittinggi		Jika iya, apakah sudah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen RAD PG di daerah		Jika tidak, apakah sudah mengetahui kewajiban daerah untuk Menyusun dokumen RAD PG		Dari 11 langkah teknis penyusunan RAD PG, sudah sampai mana tahapan perkembangan penyusunan RAD PG	Apakah sudah menetapkan SK Tim Penyusun		Apakah OPD sudah mengirim matriks penajaman strategi dan aksi RAD PG		Apa tantangan dan kendala dalam penyusunan dokumen RAD PG	Apa rencana tindak lanjut terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Belum		Sudah	Belum	Sudah	Belum		
														RPJMD tahun 2025-2029

10. Nota Dinas Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TP-Dekon Tahun 2024 dan Rencana Tahun 2025

BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Tanggal : 15 November 2024
Nomor : 050/445/ND/Eko-SDSA/Bappeda/11/2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mohon Persetujuan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tp-dekon Tahun 2024 dan Rencana Tahun 2025

Dengan hormat,

Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 terkait dengan sektor pembangunan yang didanai APBN serta rencana penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Untuk terintegrasi dan sinkronisasinya kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didanai dengan dana APBN Tahun 2024, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat maupun oleh UPT/Balai Kementerian maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke UPT/Balai Kementerian yang berada di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat serta untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan tahun 2025;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, direncanakan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dengan instrument terlampir. Mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan Dela Resina, S. Farm, ME (Perencana Ahli Muda); Nizhamul Bastian, SH (Pelaksana); dan Fauzi (Sopir) untuk melakukan perjalanan dinas ke Kab. Padang Pariaman pada tanggal 19 November 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas berkenaan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



11. Surat Permintaan Data Dekonsentrasi TP Kegiatan Tahun 2024 serta Rencana Kunjungan Lapangan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Kharib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
 E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 7 Oktober 2024

Nomor : 050/409/X/Eko-SDA/Bappeda-2024
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permintaan Data Dekonsentrasi TP Kegiatan Tahun 2024 serta Rencana Kunjungan Lapangan

Kepada Yth. :
 Bapak/Ibu (daftar terlampir)
 di
 Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta rencana penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025, kami mohon bantuan data dan informasi dari Instansi Bapak/Ibu sebagai berikut :

1. Kegiatan tahun 2024 yang didanai dengan dana APBN, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat maupun oleh UPT/Balai Kementerian yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Informasi kegiatan berupa nama kegiatan, Lokasi kegiatan, volume kegiatan, besaran dana, kendala/permasalahan serta rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2025 (format terlampir).
3. Data dapat dikirim ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat cq Bidang Ekonomi SDA atau melalui WA an Dela Resina (Hp. 081374351950).
4. Selain itu, dalam rangka pemantauan dan evaluasi program kegiatan tahun anggaran 2024 kami bermaksud mengadakan kunjungan ke Instansi Bapak/Ibu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala

Wandi, ST, MM
 Sekretaris Utama Madya
 NIP. 19750502 199903 1 004

Terselamatkan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang

Lampiran 1 :

Nomor : 050/409/X/Eko-SDA/Bappeda-2024
 Tanggal : 7 Oktober 2024
 Perihal : Permintaan Data Dekonsentrasi TP Kegiatan Tahun 2024 serta Rencana Kunjungan Lapangan

Daftar Penerima Surat :

1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Sukarami Kabupaten Solok
2. Kepala BPSI Tanaman Buah dan Tropika di Aripati Kabupaten Solok
3. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Pakan Ternak di Padang Mengatas Kab. Lima Puluh Kota
4. Kepala Balai Veteriner di Bukittinggi
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri (BARISTAN) di Padang
7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Agam Kuantan di Padang
8. Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat di Sungai Penuh Jambi
9. Kepala Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Mentawai
10. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I di Padang
11. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPPL) di Padang
12. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian di Padang
13. Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir di Bungus Padang
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Padang
15. Kepala Balai Diklat Industri Padang di Padang

12. Kuesioner/Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TP-Dekon Tahun 2024 dan Rencana Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

INSTRUMENT PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TP-DEKON TAHUN 2024 DAN RENCANA TAHUN 2025 KE KABUPATEN/KOTA

IDENTITAS RESPONDEN :

Tanggal	:		Tanda Tangan
UPT/Balai/Sabker	:		
Nama	:		
NIP	:		
Jabatan	:		

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/Permasalahan	Keterangan
1							
2							
3							
dst							

Catatan : untuk dapat disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Volume	Output/ Keluaran	Lokus	Anggaran	Dukungan yang Diharapkan dari Pemda	Keterangan
1							
2							
3							
dst							

13. Rekap Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TP-Dekon Tahun 2024 dan Rencana Tahun 2025

a. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Padang

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/Permasalahan	Keterangan
1.	Inspeksi dan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat CPB	8	Sertifikat CPB	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rp 20.000.000	Supplier tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	
2.	Inspeksi/Monev ke UPI	8	Sertifikat HACCP	Kota Padang	Rp 10.000.000	Terdapat UPI yang tidak aktif lagi sehingga inspeksi tidak dapat dilakukan	
3.	Inspeksi dan Verifikasi Pasca Panen (SAP dan SPO/CDR)	2	Sertifikat SAP dan SPO	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rp 25.000.000	Belum ada jumlah dan sosialisasi dari pusat BPPMHKP untuk teknis pelaksanaan kegiatan	
4.	Penerapan sertifikasi produksi primer yang distandarisasi	20	Sertifikat CEB, CPB, CPPB dan CPB kapal	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rp 113.000.000	Belum ada jumlah dan sosialisasi dari pusat BPPMHKP untuk teknis pelaksanaan kegiatan	
5.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Ispms 01)	2	Laporan hasil pengujian sampel dan kondisi sanitasi pasar	Pasar Kelautan, Perairan dan Labuk Sikaping Kabupaten Pasaman	Rp 40.000.000	-	
7.	Penerapan sistem Traceability di UPI	2	Sertifikat Traceability UPI	UPI di Kota Padang	Rp 2.000.000	-	
8.	Surveilans dan pengambilan contoh ke UPI untuk Official Control	4	Survei Ketahanan Hasil Surveilans	UPI di Kota Padang	Rp 4.000.000	Tidak ada proses produksi di UPI sehingga kegiatan surveilans tidak dapat dilakukan sesuai jadwal	
9.	Refreshment Panelis standar Organisasi	1	Sertifikat pelatihan juri/lembaga organisasi	Kantor BPPMHKP	Rp 1.000.000	-	
10.	Staffing	20	Hasil pengujian organoleptik dan verifikasi lapangan	UPI di Kota Padang	Rp 4.000.000	Informasi mendadak dari pihak UPI untuk pelaksanaan kegiatan	
11.	Surveilans ISO 17025:2017	1	Sertifikat ISO 17025:2017	Kantor BPPMHKP	Rp 75.000.000	-	
12.	Assesmen tidak terjadwal ISO 17020:2017	1	Sertifikat ISO 17020:2017	Kantor BPPMHKP	Rp 19.000.000	-	

Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Dukungan yang diharapkan dari Pemda	Keterangan
1.	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen	8	Sertifikat HACCP, SAP, SPO	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rp 45.000.000	Data dan informasi dari pemda terkait UPI yang akan disertifikasi	
2.	Validasi sertifikasi produksi primer	12	Sertifikat CEB, CPB, CPPB dan CPB kapal	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rp 85.000.000	Data dan informasi dari pemda terkait stakeholder yang akan disertifikasi	
3.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Ispms 01)	2	Laporan hasil pengujian sampel dan kondisi sanitasi pasar	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rp 25.000.000	Melakukan kegiatan bersama dengan dinas Perikanan Propinsi dan Dinas Perikanan selengkap	
4.	Monitoring dan evaluasi ke UPI	4	Survei Ketahanan Hasil Surveilans	UPI di Kota Padang	Rp 4.000.000	-	
5.	Refreshment Panelis standar Organisasi	1	Sertifikat pelatihan juri/lembaga organisasi	Kantor BPPMHKP	Rp 1.000.000	-	
6.	Staffing	20	Hasil pengujian organoleptik dan verifikasi lapangan	UPI di Kota Padang	Rp 4.000.000	-	
7.	Registrasi UPI ke negara mitra dan atau negara tujuan ekspor	1	Nomor registrasi negara mitra	UPI di Sumatera Barat	Rp 4.000.000	-	
8.	Assesment ISO 17025:2017	1	Sertifikat ISO 17025:2017	Kantor BPPMHKP	Rp 85.000.000	-	
9.	Assesment ISO 17020:2017	1	Sertifikat ISO 17020:2017	Kantor BPPMHKP	Rp 30.000.000	-	

Padang, 21 November 2024
PIL Kepala BPPMHKP Padang



b. BPSI Tanaman Buah dan Tropika

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan	Vol	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/ Permasalahan	Ket :
1.	Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	2 Rancangan	1. Satu konsep RSNI 1 Revisi Mangga SNI 3164:2009 2. Satu konsep RSNI 1 Revisi Durian SNI 4482 – 2013	Kab. Solok	390.000.000	Tidak ada Masalah	Pelaksanaan Jejak Pendapat (RSNI 3)
2.	Penyidikan dan Pengujian Produk	68 Produk	1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian, di laboratotium BPSI Tanaman Buah Tropika. 2. Terlaksananya pelayanan pengujian kemurnin varietas dan atau BBTV pada tanaman pisang 3. Terpeliharanya pohon induk sampel alpukat, manggis	Kab. Solok	314.107.000	Tidak ada Masalah	Telah dilaksanakan pengujian produk
3.	Layanan	1	Layanan	Kab.	100.000.00	Sebagian	Layanan

No	Kegiatan	Vol	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/ Permasalahan	Ket :
	BMN	Layanan	operasional Laboratorium dan IP2SIP	Solok	0	anggaran status blokir	operasional Laboratorium dan IP2SIP
4.	Layanan Umum	1 Layanan	Layanan Koodinasi, manajemen mutu, layanan public, pengelolaan administrasi kepegawaian dan SDM,	Kab. Solok	342.000.000	Sebagian anggaran status blokir	Layanan Koodinasi, manajemen mutu, layanan public, pengelolaan administrasi kepegawaian dan SDM,
5.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor	Kab. Solok	15.315.065.000		Gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	Penyusunan program dan anggaran	Kab. Solok	68.000.000	Sebagian anggaran status blokir	Penyusunan program dan anggaran
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	Monev, SPI dan PAT	Kab. Solok	141.000.000	Sebagian anggaran status blokir	Monev, SPI dan PAT
8.	Layanan Manajemen	1 Layanan	Pengelolaan keuangan	Kab. Solok	43.000.000	Sebagian anggaran	Pengelolaan keuangan

No	Kegiatan	Vol	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/ Permasalahan	Ket :
	Keuangan	an				status blokir	
					16.713.172. 000		

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/ Permasalahan	Keterangan
1.	Instrumen Hortikultura yang diuji	150 Produk	1.Terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian, di laboratotium BPSI Tanaman Buah Tropika. 2.Terlaksananya pelayanan pengujian kemurnin varietas dan atau BBTV pada tanaman pisang	Kab. Solok	358.717.000		
2.	Layanan BMN	1 Layanan	Pengelolaan administrasi perlengkapan	Kab. Solok	10.000.000		
3.	Layanan Umum	1 Layanan	Layanan penyusunan program dan anggaran Layanan Monev, SPI	Kab. Solok	200.000.000		

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/ Permasa- lahan	Keterangan
			Layanan Koodinasi, layanan public, pengelolaan administrasi kepegawaian dan SDM, serta Layanan keuangan				
4.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor	Kab. Solok	14.780.371.000		
					15.349.088.000		

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

c. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran (Rp)	Kendala/Permasalahan
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	1 Standar	1. Satu paket data (inventarisasi dan identifikasi) kebutuhan SNI Gambir dan SOP pendukung yang telah ada 2. Satu dokumen usulan pendukung yang diperlukan sebagai masukan bagi PNPS	Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Lima Puluh Kota	100.000	-
2	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	200 Orang	1. Menguatnya kapasitas penerap pertanian pada 8 (delapan) kawasan pengembangan jagung di Sumbar 2. Meningkatnya penerapan standar pertanian pada 8 (delapan) Kawasan pengembangan jagung di Sumbar 3. Meningkatnya produksi jagung	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman Barat	400.000	-

			di Sumbar			
3	Penguatan Kapasitas Penerap standar pertanian mendukung program Kementan	600 orang	Menguatnya kapasitas penerap standar pertanian (SNI Produksi Benih Sumber Jeruk, SNI Produksi Benih Durian secara sambung, SNI Krisan Potong) Mendukung Program Kementan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok Selatan, Kab Tanah Datar, Kab. Solok	270.000	-
4	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik lokasi Sumatera Barat	1 Lembaga	1. Terdampingi satu Lembaga/UMKM yang menerapkan standar Instrumen pertanian pengelolaan Kakao 2. Sertifikasi produk bubuk Kakao	Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	182.000	-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					
1	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat	24 Ton	Tersedianya benih sumber padi varietas unggul terstandar sebanyak 24 ton guna memenuhi kebutuhan benih padi di Provinsi Sumatera Barat.	Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok	600.000	-

Catatan : untuk dapat disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

14. Nota Dinas Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Melalui : Yth. Sekretaris
 Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
 Tanggal : 18 November 2024
 Nomor : 050/447/ND/Eko-SDA/Bappeda/11/2024
 Lampiran : 1 Dokumen
 Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mohon Izin Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti persetujuan atas Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Nomor 050/420/XI/ND/EkoSDA/Bappeda-2024 tanggal 15 November 2024 perihal Izin Perjalanan Dinas Dalam Rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 disampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi DAK Fisik Tahun 2024 Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5,27 miliar yang terdiri atas kegiatan :
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - b. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi
2. Salah satu fungsi Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah yang mencakup pemantauan terhadap realisasi anggaran, pelaksanaan fisik kegiatan, serta pencapaian hasil yang telah ditetapkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
3. Berdasarkan hal diatas, mohon kepada Bapak agar dapat menugaskan Dela Resina, S. Farm, ME (Perencana Ahli Muda), Ferra Sri Hastuti (Pelaksana) dan Muslim Libtiandra (Pelaksana) untuk melakukan perjalanan dinas ke Kota Panaman pada tanggal 21 November 2024
4. Anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut tersedia pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / para f oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Ir. Benny Sakti, M.M.
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 19670927 199403 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

15. Instrumen/Kuesioner Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Khatib Sulaiman No. 25 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
 Fax. 7055676 Website: bappeda.sumbarprov.go.id
 P A D A N G

**INSTRUMEN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2024**

1. Nama Pekerjaan :
2. Lokasi :
 Kabupaten/Kota :
3. Anggaran :
4. Pelaksana :
5. Tanggal Kontrak* : sampai dengan
6. OPD Penanggungjawab :
7. Bentuk Pekerjaan/ Kegiatan yang dilaksanakan :

8. Pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi, sudah berapa persen (%) realisasi pekerjaan yang dilaksanakan : (%).
9. Kapan dilakukan pencairan dana oleh pelaksana :
 • Tahap I : tanggal Rp.
 • Tahap II : tanggal Rp.
 • Tahap III : tanggal Rp.
 • Lumpsum/Sekaligus : (beri centang ✓)
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan, agar dijelaskan :
 •

 •

 •

 •

11. Apakah pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan kapan perkiraan waktunya?

.....

12. Apakah ada kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan berapa lama dari waktu berakhirnya kontrak?

.....

13. Saran/ Masukan/ Harapan/Tindak Lanjut dari pelaksanaan pekerjaan :

.....

**) Jika ada data terkait kontrak pekerjaan.*

IDENTITAS RESPONDEN :

Tanggal	:		Tanda Tangan
Nama	:		
NIP	:		
Jabatan	:		